

# **ALASAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI MELAKUKAN BLOKADE**

## **TERHADAP QATAR**

**Rizza Setia Octaviarie**

**Departemen Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Airlangga E-mail: [setiarizza@gmail.com](mailto:setiarizza@gmail.com)**

Penelitian ini membahas tentang blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar dikarenakan *Qatar News Agency* (QNA-Kantor Berita Qatar) ditenggarai diretas oleh pihak yang tidak diketahui dengan membuat sebuah *running text* yang seolah-olah mengesankan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memuji pihak Hamas; menganjurkan persahabatan dengan Iran; dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel. Sikap keras yang dilakukan oleh Arab Saudi ini tentunya memiliki latar belakang motivasi Arab Saudi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri tentunya pasti didasari kepentingan nasional yang pastinya memiliki alasan yang kuat untuk melindungi, mempertahankan kekuasaan serta keamanan teritorial. Peneliti melihat ada aspek-aspek struktur dan identitas yang berada dibalik keputusan yang dilakukan Arab Saudi dengan mengambil tindakan blokade terhadap Qatar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya perbedaan identitas ideologi dibelakang aktor negara. Antara lain kedekatan Qatar dengan organisasi Ikhwanul Muslimin dan negara Iran menyebarkan revolusi Islam menjadi penyebab utama yang membuat Arab Saudi melakukan tindakan tersebut. Aktivitas Qatar dan Ikhwanul Muslimin saat mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar berkaitan dengan rentetan momentum Arab Spring, campur tangan Qatar di kantor berita Al Jazeera memberikan pengaruh besar dalam bagaimana Arab Saudi memandang bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Qatar akan melemahkan stabilitas kawasan.

**Kata Kunci : Arab Saudi, Qatar, Blokade, Salafi, Ikhwanul Muslimin**

## PENDAHULUAN

Pada 23 Mei 2017, *Qatar News Agency* ditenggarai diretas oleh pihak yang tidak diketahui dengan membuat sebuah *running text* yang seolah-olah mengesankan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memuji pihak Hamas; menganjurkan persahabatan dengan Iran; dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel.

Pada waktu yang sama muncul *tweet* dari kantor berita QNA yang menyatakan bahwa Qatar menuduh Arab sedang merencanakan penentangan pada Qatar kemudian menginstruksikan penarikan semua duta besar dari Doha. Meskipun *tweet* tersebut langsung dihapus, namun kerusakan diplomatik yang ditimbulkannya tak terelakkan. Saluran satelit di Arab Saudi berulang kali menayangkan cuplikan berita tersebut, dan semakin meningkatkan suhu politik.

Dinamika isu semakin bergulir, ditandai dengan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni 2017, kemudian disusul beragam kejadian lainnya antara lain maskapai penerbangan yang berbasis di Abu Dhabi, Etihad Airways dan maskapai yang berbasis di Dubai, Emirates, membekukan semua penerbangan dari dan ke Doha, mulai Selasa pagi menutup penerbangan ke Qatar, yang direspon Kemenlu Qatar sebagai tindakan yang merusak kedaulatan ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Disusul dengan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sebagai bentuk dukungan ke Arab. Mengikuti Emirates dan dan Etihad, maskapai penerbangan FlyDubai, Saudi Airlines, Air Arabia membatalkan semua penerbangan ke Doha. Pukul 2 siang, Arab Saudi menutup perbatasan darat dan laut dengan Qatar. Kemudian Mesir memanggil para duta besarnya pulang dari Qatar dan memberi waktu mereka 48 jam untuk meninggalkan Doha. Selanjutnya pukul 4 sore waktu setempat, pelabuhan Fujairah UEA

meolak semua kapal-kapal berbendara Qatar untuk berlabuh, hal ini menyebabkan suplai bahan makanan dari Iran terhambat menjadi 12 jam perjalanan karena harus menempuh jalur yang lebih panjang. Kemudian, Kantor berita milik Qatar Al Jazeera di Arab Saudi juga ditutup. Pukul 7.30 malam Kementerian Penerbangan Sipil Mesir mengumumkan bahwa zona udara Mesir ditutup bagi Qatar ( Nurwijoyo, Agung, dkk, 2017)

Pada hari selanjutnya 6 Juni 2017, pukul 1 dinihari Menlu Qatar Syaikh Muhammad Bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan di Al Jazeera bahwa akan mengadakan dialog secara terbuka dengan pihak Arab Saudi untuk membendung krisis. Presiden Erdogan juga turun tangan menghubungi pemimpin negara-negara Teluk, Rusia, Kuwait dan Arab Saudi untuk meredakan tensi ketegangan dan mengutamakan kepentingan perdamaian dan stabilitas regional.

Menyadari kondisi yang kian memanas, akhirnya dengan mediasi dari Kuwait, pihak negara-negara Teluk mengajukan daftar tuntutan pada Qatar yang berisi 13 tuntutan, yakni ; (1) Agar Qatar membatasi hubungan diplomatik dengan Iran, mengeluarkan anggota Garda Revolusi Iran dari Qatar dan menghentikan kerjasama gabungan militer dengan Iran, berhubungan dengan Iran hanya perdagangan sesuai dengan sanksi AS dan internasional yang ditetapkan, (2) Memutuskan semua hubungan dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin, (3) Menghentikan siaran Al Jazeera, (4) Menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar, secara langsung maupun tak langsung, termasuk *Arabi21*, *Rassd*, *Al Araby Al-Jadeed*, dan *Middle East Eye*, (5) Mengakhiri kerjasama militer gabungan dengan Turki di Qatar, (6) Menghentikan semua bentuk sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah dituduh sebagai teroris oleh negara Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan AS, (7) Menyerahkan tokoh teroris dan individu yang dicari oleh pihak Arab Saudi, UEA, Mesir dan AS, membekukan aset mereka, informasi tempat tinggal dan gerakan pendanaan teroris, (8) Akhiri campur tangan Qatar dengan permasalahan negara berdaulat, (9) Menghentikan

kontak dengan semua pihak oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir, kemudian menyerahkan semua dokumen yang merinci kontak Qatar sebelumnya dan dukungan yang ditujukan pada pihak tersebut, (10) Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir, (11) Mensejajarkan diri dengan negara-negara Teluk dan negara Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014, (12) Menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah diserahkan kepada Qatar, namun daftar ini tidak menentukan apa yang dilakukan oleh negara-negara penuntut jika Qatar menolak mematuhi, (13) Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, kemudian dilakukan perkuartal setelah tahun kedua selama 10 tahun akan dilakukan pemantauan kepatuhan terhadap Qatar ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)).

Menghadapi kondisi ini pemerintah Qatar, Kementrian Dalam Negeri Qatar merespon dengan merilis bantahan resmi dan membentuk tim investigasi dengan meminta bantuan badan keamanan Inggris dan FBI sebagai pihak yang netral dan mengawasi pelaksanaan investigasi. Dari hasil penyelidikan *preliminary report*, ditemukan adanya bukti peretasan yang dilakukan dengan teknologi tinggi dengan memanfaatkan *cyber bug* yang telah ditanam pada situs QNA sejak April 2017 ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Berbekal temuan tersebut, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed Abdulrahman Al-Thani dalam Konferensi Pers di Doha pada 6 Juni 2017 menyatakan bahwa Qatar akan menyikapi hal ini dengan tidak akan memperburuk situasi, serta memilih menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di meja negosiasi (Haryono, Willy. 2017. dalam [www.metronews.com](http://www.metronews.com)).

Sementara nagara lain di kawasan Timur Tengah misalnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menyatakan sikap sangat menyesalkan keretakan hubungan Qatar

dengan negara-negara Arab lainnya dan menyerukan agar kedua belah pihak melakukan perundingan. Turki juga menawarkan bantuan untuk membantu menengahi konflik ini ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)).

Sementara dari negara Eropa, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menghimbau agar negara-negara Teluk yang melakukan blokade pada Qatar untuk mencabutnya, dan mengutamakan dialog semeja untuk menyelesaikan konflik ini. Johnson juga menyampaikan harapan besar pada Kuwait untuk bisa menjadi penengah dalam masalah ini (Maulana, Victor. 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menekankan pada bagaimana latar belakang motivasi Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Sebuah keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri tentunya pasti di dasari dengan kepentingan nasional yang pastinya memiliki alasan yang kuat untuk melindungi, mempertahankan kekuasaan serta keamanan teritorial.

Kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk interaksi yang terjadi antar negara karena di dalamnya terdapat tindakan dan juga respon dari tindakan tersebut. Dalam proses memutuskan kebijakan di luar negeri, elemen paling utama pastinya adalah pemimpinnya, sebab pemimpin adalah aktor utama yang menjadi *driven* kebijakan suatu negara, namun selain pemimpin, ada aktor-aktor politik lainnya, misalnya negara-negara lain, kebijakan internasional, pers, atau pada abad ini bentuk-bentuk kekuatan ekonomi suatu negara juga bisa menjadi *driven* tertentu dalam memutuskan kebijakan luar negeri mereka. Maka latar belakang dan motivasi Arab Saudi dengan kebijakan luar negerinya melakukan blokade terhadap Qatar ini sangat menarik untuk dikaji.

## DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR

Antara Arab Saudi dengan Qatar memang memiliki hubungan yang naik turun, disisi lain tudingan mengenai Qatar yang mendanai teroris adalah bukan sesuatu yang baru. Pergolakan hubungan diplomatik antara kedua negara dimulai pada tahun 1995 saat kepemimpinan Qatar diambil oleh Sheikh Hamad atas kudeta kepada ayahnya Sheikh Khalifah. Pada kepemimpinannya, Sheikh Hamad memutuskan untuk memulain menganut “*Strategic Hedging*” dalam politik luar negerinya (K. Irnad Harb, 2017)

Pada 2014, negara-negara Teluk juga melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa Doha mendukung Ikhwanul Muslimin yang dianggap organisasi “teroris” oleh Arab Saudi dan UEA. Hubungan ketiga negara tersebut dengan Qatar kembali membaik setelah delapan bulan, yang ditandai dengan pengembalian duta besar ketiga negara ke Doha. Namun, hubungan baik itu kembali retak dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik pada 5 Juni lalu oleh Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.

Pemanasan hubungan diplomatik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar kembali muncul kepermukaan pada tahun 2017. Pemerintah Qatar diwakili oleh menteri luar negeri Qatar memberikan konfirmasi resmi bahwa *Qatar News Agency* telah diretas oleh kelompok tidak bertanggung jawab dan menyebarkan berita tanpa dasar yang jelas. Qatar jelas menolak adanya statement tersebut dan mengkonfirmasi bahwa saat itu *Qatar News Agency* telah diluar kendali pemerintah. Pada tanggal 5 Juni 2017, kampanye anti media terhadap Qatar pada akhirnya menjadi keputusan politik resmi mengenai embargo dan juga pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang dilakukan oleh beberapa negara teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi ((K. Irnad Harb, 2017)

**Tabel 1**

**Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Qatar tahun 1995-2017**

No	Tahun	Kejadian
1	1995	Sheikh Hammad Bin Khalifa Al-Tahani menanda tangani kebijakan dengan Iran dan Israle dalam pengembangan produksi LNG (Liquid Natural Gas)
2	1996	Qatar menanda tangani perjanjian dengan Israel untuk mendirikan kantor perdagangan Israel di Doha
3	2002	Kantor berita Qatar memberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi memanggil duta besarnya yang ada di Doha untuk kembali selama enam hari
4	2008	Hubungan kedua negara kembali membaik dengan perjanjian bahwa Al-Jazeera membatasi mengenai liputan terhadap Qatar
5	2012	Qatar dilaporkan mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah
6	Januari 2013	Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jazim Al-Thani mengumumkan pemberian dan dukungan penuh atas pemberontakan di Mesir
7	Juli 2013	Pihak pemberontak yang didukung Qatar di Mesir kalah dan hubungan antara Qatar dan Mesir memanas
8	2014	Pemutusan Hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Uni Emirate Arab, dan Bahrain terhadap Qatar
9	16 November 2014	Hubungan Qatar dengan ketiga negara kembali membaik
10	23 Mei 2017	Kampanye anti media Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UEA
11	5 Juni 2017	Keputusan resmi mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara 7 negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi terhadap Qatar
12	6 Juni 2017	Pengajuan 13 syarat terhadap Qatar yang disampaikan kepada Kuwait untuk mengembalikan hubungan diplomatik seperti semula

**PERANAN PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM KEBIJAKAN  
QATAR YANG DIANGGAP ARAB SAUDI DAPAT MENGANCAM STABILITAS  
KAWASAN TIMUR TENGAH**

Berkenaan dengan stabilitas keamanan kawasan, Arab Saudi dan Qatar juga berkomitmen dalam bidang keamanan kawasan melalui sebuah perjanjian keamanan yang dikenal dengan “Perjanjian Riyadh” pada 23 November 2013. Dokumen perjanjian ini, menjabarkan komitmen untuk menghindari setiap intervensi urusan internal negara lain, termasuk melarang dukungan finansial maupun politik untuk kelompok-kelompok menyimpang. Perjanjian Riyadh ini secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul

Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan. Kemudian, dokumen kedua ikut ditandatangani oleh seluruh negara anggota GCC pada 16 November 2014 yang diberi kop “*Top Secret*”. Dokumen kedua ini menjelaskan para pihak yang ikut menandatangani perjanjian untuk mendukung stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin serta mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai sarana oleh beberapa tokoh atau kelompok-kelompok yang mengadakan perlawanan menentang otoritas Mesir. Namun dalam perjalanannya, ternyata perjanjian tersebut dilanggar oleh Qatar, sehingga membuat Arab Saudi dan negara anggota GCC lainnya memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar (Al-Thalibi, Abu Abdirrahman, 2006).

Lebih lanjut, para anggota GCC menganggap Qatar telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian Riyadh, poin penting yang dilanggar Qatar adalah bentuk dukungan Qatar pada organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) dari Mesir. Qatar melalui Al-Jazeera memberikan hak istimewa kepada Syaikh Yusuf Qordhowi untuk mengisi program acara yang bertajuk “Al-Syari'ah wa Al-Hayah” (Syariat dan Kehidupan). Acara ini dipandu langsung oleh Syaikh Yusuf Qordhowi yang berisi ceramah dan fatwa beliau serta tanya-jawab dengan para pemirsa (David E. Long and Bernard Reich. 1980).

Kedekatan antara Syaikh Yusuf Qordhowi beserta jejaring Ikhwanul Muslimin dengan Kerajaan Qatar tentu saja memberi banyak kemudahan bagi aktivis Ikhwanul Muslimin untuk mengakses dan sekaligus memanfaatkan Al Jazeera ataupun akses lain yang dimiliki oleh Qatar. Sejak Al-Jazeera didirikan pada tahun 1996, pemerintah Qatar, banyak melakukan investasi pada channel tersebut, namun secara terbuka menegaskan bahwa Al Jazeera akan tetap independen dari kepentingan politik ataupun kebijakan Qatar. Qatar menyediakan dana \$ 137 juta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Al Jazeera sebagai media dan dana yang digelontorkan tersebut bersifat pinjaman, bukan hibah, dan



ditetapkan jangka waktunya, agar Al-Jazeera mengembalikan dana pinjaman tersebut dan bisa menjadi stasiun TV yang berdiri sendiri pada tahun 2001 (Iskandar, Adel and Mohammed El Nawawy, 2017).

Saat ini banyak kalangan Arab yang menganggap Al Jazeera bukan lagi suara perubahan di Timur Tengah, Al Jazeera berubah menjadi media propaganda bagi pemiliknya, yaitu Qatar dan mereka sepenuhnya bekerja untuk kepentingan Emir Qatar. Menurut keterangan wartawan Al Jazeera keputusan di televisi tersebut tidak lagi diambil berdasarkan prioritas wartawan, akan tetapi berdasarkan kepentingan Kementerian Luar Negeri Qatar (Azran Tan Samuel, 2013)

Dalam pemberitaannya, Al Jazeera kerap vokal melontarkan kritik pada pemerintah otoriter di kawasan Timur tengah, untuk tema-tema yang berkaitan tentang hak asasi manusia, terorisme dan diplomasi merupakan tiga tema sentral pemberitaan mengenai Saudi yang sering diberitakan selama konflik. Pemberitaan Al Jazeera ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan pada masyarakat Arab menyebabkan suatu pergeseran yang berpengaruh terhadap politik nasional dan internasional dalam kawasan Jazirah Arab.

## **PERBEDAAN DASAR PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN YANG DIANUT OLEH QATAR DAN PEMIKIRAN SALAFI OLEH ARAB SAUDI**

Melengkapi penelitian ini, maka dibahas mengenai perbedaan pemikiran mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin yang berada di belakang Qatar dan organisasi Salafi yang berada di belakang Arab Saudi. Kedua identitas ini tidak bisa dipisahkan dari negara tersebut, karena masing-masing memiliki peranan yang sangat kuat di masing-masing negara.

Ikhwanul Muslimin (IM) adalah organisasi yang didirikan Hasan al- Banna di Mesir dengan menganut aliran Islam modernis. Ikhwanul Muslimin juga merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam melakukan mobilisasi massa dalam revolusi 25 Januari

di Tunisia. Ikhwanul Muslimin juga merupakan elemen penting penggagas berdirinya partai politik Keadilan dan Kesejahteraan, yang memenangkan Mohammed Mursi pada pemilu pertama usai jatuhnya Mubarak, kemenangan Mohammed Mursi di tahun 2012 sebagai pengganti Mubarak. Tentunya hal ini semakin menambah simpati rakyat dan bentuk eksistensi Ikhwanul Muslimin (Al-Banna, Hasan, 2005).

Kemenangan Mohammed Mursi dalam pemilihan Presiden Mesir adalah sebuah momentum dari dominasi Ikhwanul Muslimin dalam politik Mesir. Ide Ikhwanul Muslimin sangat terinspirasi dari agama menempatkan Ikhwan sebagai gerakan yang dapat dikategorikan sebagai *religious movement*. Identitas keagamaan yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin sangat membantu dan mempermudah langkah Ikhwanul Muslimin dalam mencapai tujuan politik. Basis massa yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin juga sangat kuat karena identitas yang mempersatukannya adalah identitas fundamental yakni identitas keagamaan. Apa yang menjadi prinsip dasar dari Ikhwanul Muslimin ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diyakini Salafi.

Jika Ikhwanul Muslimin cenderung toleran dengan istilah-istilah seperti ‘demokrasi’, maka Wahabi justru sebaliknya, mereka cenderung intoleran dengan hal-hal yang berbau demokrasi. Hal ini terlihat sangat jelas dari cara-cara kelompok Wahabi dalam menjaga Arab Saudi tetap memiliki mode pemerintahan monarki, dan sebaliknya Ikhwanul Muslimin justru berusaha menggunakan demokrasi untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua organisasi ini (Ikhwanul Muslimin dan Salafi) meskipun memiliki perbedaan, mereka juga memiliki persamaan, yakni memandang bahwa sebuah negara wajib menjalankan syariat Islam secara Kaffah (sempurna). Wahabi dan Ikhwanul Muslimin juga percaya bahwa pentingnya membawa agama kepada ranah politik, dalam arti Wahabi dan Ikhwanul Muslimin merasa perlunya memperoleh kekuasaan di dalam politik dan kenegaraan agar dapat menegakkan “Khilafah”.

Pada akhirnya, khilafah ini akan mengarahkan doktrin “politisasi agama” kepada non-Muslim, termasuk muslim yang dianggap sebagai “sesat/kafir”, sehingga doktrin ini lebih dikenal dengan istilah takfiri. Jika Wahabi melakukan politisasi agama dengan cara konservatif seperti, berbahasa dengan jargon-jargon agama ataupun syiar-syiar agama dalam bentuk lain, bahkan cara berpakaian pun cenderung berbeda dengan pakaian sehari-hari umat lainnya, misalnya dengan pakaian Thawab, celana cingkrang untuk pria, dan Abaya, Cadar, Niqab untuk wanita.

Ikhwanul Muslimin cenderung lebih melakukan pendekatan yang lebih pragmatis dan akomodatif terhadap modernisasi, walaupun itu sebenarnya hanyalah kedok belaka supaya terlihat sebagai sahabat modernisasi, padahal tujuan dan cita-cita Ikhwanul Muslimin juga mempolitisasi agama seperti Wahabi. Dibanding wahabi, Ikhwanul Muslimin lebih liberal dalam pengertian memahami teks secara kontekstual dan mengakomodasi istilah-istilah Barat ke dalam terminologi Islam, seperti ‘demokrasi’, ‘revolusi’, dan ‘demonstrasi’ (C. M. Blanchard, 2009).

Apabila revolusi Timur Tengah dipahami secara mendalam, menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang bisa memicu terjadinya revolusi di Arab Saudi, dua faktor pemicu revolusi yang dimaksud adalah isu demokratisasi yang disandingkan dengan isu kesejahteraan dan konflik agama yakni konflik antara Sunni dan Syi’ah.

Faktor pertama, isu demokratisasi Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi adalah pemerintahan monarki absolut, sehingga isu demokratisasi merupakan suatu hal yang dapat membahayakan sistem pemerintahan monarki absolut Arab Saudi karena demokratisasi akan melemahkan bahkan menghancurkan kekuasaan monarki.

Pendukung demokratisasi Arab Saudi merupakan kelompok yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mendukung dan menganjurkan

demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik. Kelompok pendukung demokratisasi Arab Saudi menamakan dirinya Al-Sahwa yang berarti kebangkitan.

Keadaan negara yang berbentuk monarki yang tidak sesuai dengan demokrasi menjadikan Arab Saudi negara yang tidak bisa menerima demokrasi diterapkan dinegaranya. Faktor pemicu revolusi kedua yang juga terdapat di Arab Saudi adalah konflik Sunni-Syi'ah. Arab Saudi adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam Sunni yang sering disebut sebagai kelompok Wahabi.

Arab Saudi merupakan negara Islam yang mengambil pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah menjadi konstitusi negaranya. Konsekuensi dari konstitusi tersebut adalah Arab Saudi menerapkan ajaran Islam di dalam sistem pemerintahannya. Konstitusi yang berlandaskan inti ajaran Islam juga memiliki konsekuensi berupa keterlibatan ulama Wahabi Arab Saudi di dalam pemerintahan Arab Saudi (Steinberg, Guido, 2014).

Selain itu, latar belakang historis Arab Saudi yang tidak bisa dipisahkan dari peran kelompok Wahabi baik dalam pendirian negara maupun pemerintahannya. Arab Saudi sebagai negara monarki absolut tidak dapat menerima masuknya demokrasi yang dibawa oleh Arab Spring ke dalam sistem pemerintahannya dengan berbagai pertimbangan, seperti demokrasi dapat mengakibatkan masuknya kekuatan yang dapat merusak stabilitas pemerintahan Arab Saudi seperti Syi'ah dan pertimbangan lainnya.

Momentum Arab Spring dimanfaatkan kelompok pro-demokrasi yang berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk menyampaikan tuntutan Saudi. Akibat tuntutan yang terus disampaikan pihak pro-demokrasi menjadikan Arab Saudi mengambil strategi untuk menekan langsung pada pusat pergerakan paham pro-demokrasi tersebut. Arab Saudi memilih sikap konfrontasi terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dianggap sebagai penyebab kerusakan kawasan Timur Tengah (Holsti, K. J., 1970)

Demikian pula alasan mendasar dibalik sikap politik yang kemudian diambil oleh Arab Saudi saat melakukan blokade Qatar dan 13 tuntutanya tersebut. Jika di cermati lebih mendalam, tindakan blokade Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah bentuk dari upaya Arab Saudi untuk membendung pengaruh demokrasi di kawasan timur tengah. Misalnya dengan Arab Saudi meminta agar Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Seperti diketahui bahwa Iran adalah negara syiah yang mana Iran juga terkenal dengan upaya-upayanya untuk mentransfer nilai-nilai Syiah dan nilai-nilai demokrasi berusaha untuk mengeskpor paham revolusi mereka.

Iran pasca runtuhnya rezim Pahlevi adalah Iran yang baru, dimana Ayatollah Khomeini menggaris bawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti penindasan. Apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya.

Iran juga cukup agresif melakukan ekspor revolusi di negara-negara lainnya dengan cara memanfaatkan jaringan radio milik pemerintah Iran untuk penyebaran berita secara global dan memiliki cabang di 45 negara. Apalagi Iran semakin aktif dan rekat menggalang kerjasama dengan Qatar karena kesamaan mereka memiliki gas bumi. Maka ketakutan Arab Saudi terhadap pengaruh Iran tentunya menjadi wajar.

Ditambah pula dengan organisasi Ikhwanul Muslimin di belakang Qatar yang seperti dijelaskan memiliki ideologi yang sangat bersebrangan dengan monarki absolut oleh negara Arab. Al Jazeera adalah perpanjangan tangan upaya-upaya Ikhwanul Muslimin untuk menanamkan paham demokrasi dalam kawasan dengan berbagai cara. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan keberhasilan Al Jazeera menggiring opini publik dalam peristiwa Arab Spring yang kemudian membuat perubahan tatanan struktur pemerintahan di beberapa negara kawasan dengan menggunakan mobilisasi *people power*.

Tentunya pola yang sama menjadi hal yang paling ditakutkan oleh Arab juga akan meruntuhkan pemerintahan monarki absolut yang dimiliki oleh Arab dan berujung pada runtuhnya dinasti Al Saud yang telah menguasai Arab selama 200 tahun. Maka tindakan blokade terhadap Qatar adalah tindakan pencegahan paling logis untuk membendung itu semua, sebab Qatar dengan perekonomiannya yang semakin kuat dan organisasi Ikhwanul Muslimin, serta Iran dibelakangnya ditakutkan Arab Saudi menjadi kekuatan untuk meruntuhkan negaranya (McSparren, J., & Besada, H, 2017).

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa faktor yang menjadi pendorong pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi sebagai negara yang berpengaruh dalam keanggotaan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) melakukan blokade terhadap Qatar adalah peningkatan agresivitas politik Qatar yang dapat mengancam stabilitas keamanan Kawasan Timur Tengah.

Dalam tuntutan yang diminta oleh Arab Saudi kepada Qatar, ada tiga tuntutan utama yang dianggap oleh Arab Saudi membuat stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah terancam, pertama berkaitan dengan penerimaan Qatar terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin yang dalam perjanjian Riyadh secara jelas melarang anggota GCC untuk memberikan bantuan apapun pada pihak Ikhwanul Muslimin.

Hal ini dikarenakan ideologi Ikhwanul Muslimin yang cenderung pro demokrasi bertentangan dengan ideologi monarki, berupa kepemimpinan dinasti yang banyak dianut oleh negara-negara Teluk. Dalam hal ini, posisi politik Qatar di belakangnya didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang cenderung moderat berseberangan dengan kebijakan-kebijakan anggota GCC lain, khususnya Arab Saudi yang cenderung dipengaruhi pemikiran salafi sehingga menimbulkan keresahan pada negara tersebut.

Kedua, permintaan Arab Saudi untuk menutup Al Jazeera. Hal ini dikarenakan keberadaan Al Jazeera yang sangat vokal melakukan kritik dan melakukan beragam bombardir pemberitaan yang dianggap malah memperkeruh suasana panas akibat Arab Spring di Timur Tengah.

Momentum Arab Spring yang berawal dari Tunisia semakin memanas dan merembet ke negara Arab lainnya, Mesir, Bahrain, bahkan Syria sampai sekarang rakyat masih bergolak untuk meruntuhkan rezim Bassar Al Asad. Arab Saudi menilai hal tersebut ada campuran pemberitaan dari Al Jazeera. Al Jazeera juga dianggap Arab Saudi sebagai alat penyebar ideologi pro demokrasi Ikhwanul Muslimin karena Yusuf Al Qordhowi sebagai tokoh besar Ikhwanul Muslimin setiap Jumat mendapatkan acara untuk siaran mengenai “Syariaa and Life” di Al Jazeera.

Ketiga adalah tuntutan Arab Saudi agar Qatar memutuskan kerjasama dengan Iran, dimana Iran adalah rival terbesar Arab Saudi sejak dulu. Rivalitas Arab Saudi dengan Iran dikarenakan banyak hal, antara lain karena perseteruan terkait dengan harga minyak, kemudian perseteruan aliran agama antara Sunni dan Syiah, dimana perseteruan agama ini kemudian juga mengarahkan mereka pada perseteruan terkait dengan ideologi. Iran dengan dasar agama Syiah-nya memiliki ideologi tentang ekspor revolusi Islam yang bertentangan dengan ideologi dari Arab Saudi.

Bila ditarik garis dari peristiwa Arab Spring dapat diketahui bahwa tindakan blokade Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah bentuk dari upaya Arab Saudi untuk membendung pengaruh revolusi demokrasi Islam syiah di kawasan timur tengah. Sebagai gambaran, Arab Saudi meminta agar Qatar memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Seperti diketahui bahwa Iran adalah negara syiah yang mana Iran juga terkenal dengan upaya-upayanya untuk mentransfer nilai-nilai Syiah yang digunakan untuk mengeksport paham revolusi mereka.

Meninjau lebih lanjut, Iran pasca runtuhnya rezim Pahlevi adalah Iran dengan bentuk pemerintahan yang baru, dimana Ayatollah Khomeini menggarisbawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti penindasan. Apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya.

Kedua, Iran harus agresif melakukan ekspor revolusi di negara-negara lainnya kemudian kekuatan armada, keluasan wilayah, dan kekuatan politik Iran hampir sama dengan Saudi Arabia di jazirah Arab. Apalagi Iran semakin aktif dan rekat menggalang kerjasama dengan Qatar karena kesamaan mereka memiliki gas bumi. Maka ketakutan Arab Saudi terhadap pengaruh Iran tentunya menjadi wajar.

Sehingga imbasnya, apabila Qatar dekat dengan Iran, yang ditakutkan Saudi adalah Iran akan memberikan pengaruh demokrasi ataupun revolusi kepada Qatar, apalagi Qatar sekarang menjelma menjadi negara kaya, sehingga kelak akan mempengaruhi negara-negara kawasan lainnya dan dinasti Al Saud.

Jika dirunut, dari 13 tuntutan yang dituntut pada Qatar, kesemuanya adalah bentuk ketakutan dari Arab Saudi terkait dengan ideologi demokrasi yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin di belakang Qatar. Kemudian benang merah pro demokrasi juga nampak pada ideologi revolusi yang dibawa oleh Iran. Upaya blokade terhadap Qatar tersebut adalah upaya untuk membendung pengaruh tersebut. Pola yang sama yang digunakan dalam Arab Spring, yakni *people power* menjadi hal yang paling ditakutkan oleh Arab Saudi karena akan meruntuhkan pemerintahan monarki absolut yang dimiliki oleh tersebut dan berujung pada runtuhnya dinasti Al Saud yang telah menguasai Arab selama 200 tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azran, Tan Samuel. *Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State – Sponsored Media Diplomacy*. Sammy Ofer School of Communications, The Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya 46150, Israel. SAGE Publications. 2013.
- Al-Thalibi, Abu Abdirrahman *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi*. Jakarta: Hujjah Press. 2006.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, Solo: Era Intermedia, , 2005
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A critique of development ideologies*, Chicago: University of Chicago Press. 1988.
- C. M. Blanchard, 'Islam: *Sunni and Shiites*', Congressional Research Service, 28 Januari 2009.
- David E. Long and Bernard Reich. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*, Colorado : Westview Press. 1980.
- Echagüe, Ana, Saudi Arabia: *Supply-Side Reform? FRIDE Policy Brief*, No. 15, July 2009
- Holsti, K. J. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, Blackwell Publishing. 1970.
- Iskandar, Adel and Mohammed El Nawawy. *Al Jazeera : The Story of The Networks That is Rattling Governments And Redefining Modern Journalism*. Westview Press-Perseus Books Groups. 2017.
- Laipson, Ellen and Friends, "After The Revolts". Source: The Wilson Quarterly (1976-), Vol. 35, No. 4 (AUTUMN 2011), pp. 6-7. Published by: Wilson Quarterly, 2011.
- McSparren, J., & Besada, H. *Qatar's Global Investment Strategy for Diversification and Security in The Post-Financial Crisis Era*. Centre on Governance Research Paper Series, 1. 2017.
- Noorhaidi, Laskar Jihad: *Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Tesis Dr. Falsafah. Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Universiteit Utrecht. 2005.
- Rapucum. *Emerging Giants Defning the trend: How increasing investment from Asia and the Middle East is turning them into sport's Emerging Giants*. Repucum, 5. 2014.
- Steinberg, Guido. *Leading the Counter-Revolution Saudi Arabia and the Arab Spring*, SWP Research Paper, Jerman. 2014.
- K. Hard. Imad, Why Qatar? Explaining Contention Issue dalam Doumar, George dkk. Crisis In The Gulf Cooperation Council (Challange and Prospect), (Washington DC: Arab Center Washington DC, 2017
- Nurwijoyo, Agung, dkk. *Tensi Diplomatik Kawasan Teluuk : Pemutusan Hubungan Diplomatik dan Isolasi Negara-negara Teluk Terhadap Qatar*, 2017
- Yusuf Qardhawi, *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari''ah al-Ismlamiyah*, terj. M. Zakki dan Yasir Tajid "Membumikan Syari''at Islam", Cet. I Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

### Sumber lain :

- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40160534> akses pada 27 Juni 2019
- <https://kumparan.com/ahmad-rifai/daftar-tuntutan-negara-negara-arab-terhadap-qatar> akses pada 19 Agustus 2018
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41217175> akses pada 27 Juni 2019

Haryono, Willy. 2017. dalam  
[<http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Rb1OzY1K-qatar-tegaskan-akan-menahan-diri-di-tengah-kisruh-diplomatik>] Diakses pada 28 Maret 2018  
Tempo.co. 2017. dalam [<https://dunia.tempo.co/read/881828/krisis-diplomatik-qatar-negara-arab-turki-siap-menengahi>] Diakses pada 28 Maret 2018